



► PROGRAM PERMUKIMAN

16 KK Batal Peroleh Bantuan RTLH

SLEMAN—Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menyatakan anggaran stimulus rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Bumi Sembada selesai disalurkan per Rabu (9/7).

Dari 597 kepala keluarga (KK) yang diusulkan memperoleh bantuan, sebanyak 16 KK dicoret, sehingga hanya ada 581 KK yang ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, mengatakan ada 16 KK yang mengundurkan diri dari program rehabilitasi RTLH. Alasannya adalah ketidaksiapan.

“Ketika kami survei, mereka mengaku siap, namun beberapa saat kemudian mereka mundur dengan alasan tidak siap karena uang yang rencananya digunakan untuk rehabilitasi digunakan untuk membayar keperluan sekolah anak,” kata Suwarsono ditemui di kantornya, Senin (14/7).

Menurut Suwarsono, kuota untuk 16 KK akan dialokasikan untuk APBD Perubahan dengan tambahan sebanyak lima unit RTLH sasaran. Lima unit tersebut tersebar di Kapanewon Cangkringan, Mlati, dan Gamping. Surat keputusan (SK) ihwal penetapan sasaran rehabilitasi akan dikeluarkan lagi.

Adapun alokasi di APBD Murni 2025 untuk program stimulus rehabilitasi RTLH mencapai Rp8,15 miliar. Tiap KK mendapat nominal bantuan yang berbeda-beda tergantung pada kerusakan rumah. RTLH rusak berat akan mendapat Rp20 juta, rusak sedang Rp16 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.

Untuk penggunaannya, Suwarsono mengungkapkan penerima manfaat akan membelanjakan bantuan itu menjadi material di toko bangunan yang sebelumnya telah disurvei bersama DPUPKP dan pemerintah kalurahan. Pemerintah kalurahan juga bisa memberi saran lokasi pembelian dengan mengacu pada harga dan kualitas material.

BKK Danais

Selain anggaran stimulus, ada 45 KK yang juga menjadi sasaran program pembangunan RTLH. Ada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan yang disalurkan untuk 45 KK. Per KK mendapatkan Rp65 juta. Anggaran tersebut bukan stimulus untuk rehabilitasi, tapi pembangunan rumah baru.

Menurut Suwarsono, anggaran Rp65 juta tersebut cukup untuk mendirikan satu rumah. Pembangunannya paling tidak memakan waktu tiga bulan. “SK untuk bantuan dari BKK Danais saya masih menunggu juga. Rumah yang dibangun lewat BKK Danais ini nanti akan punya ornamen atau identitas budaya Jawa Jogja,” katanya.

RTLH menjadi salah satu indikator dalam penentuan suatu wilayah dikatakan miskin atau miskin ekstrem. Sebab itu, penanganan RTLH menjadi bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan. Rumah yang laik huni akan meningkatkan kesehatan dan produktivitas penghuni rumah.

Kepala Dinas Sosial Sleman, Mustadi, sempat mengatakan ada delapan kapanewon yang memiliki jumlah KK miskin lebih dari 2.000 KK, masing-masing Kapanewon Gamping, Kapanewon Godean, Kapanewon Seyegan, lalu ada Mlati, Prambanan, dan Kalasan. (Andreas Yuda Pramono)